

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SEI SIKAMBING-D MEDAN PETISAH

Oleh:

Doli Tua Mulia Raja Panjaitan ¹⁾

Febri Kristina Mungkur ²⁾

Putri Diari Laia ³⁾

Universitas Darma Agung ^{1,2,3)}

E-mail:

dolipanjaitan@gmail.com ¹⁾

febrikristina@gmail.com ²⁾

putridiari@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

This study aims to find out how the implementation of direct cash assistance (BLT) policies to improve people's welfare in the Sei Sikambang D sub-district and the inhibiting factors in the distribution of direct cash assistance (BLT) to improve people's welfare in the Sei Sikambang-D sub-district. The type of research used is a qualitative research method with a descriptive research type. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The informants in this study consisted of 10 (ten) people who were determined using purposive sampling. The results of research on the implementation of direct cash assistance (BLT) policies to improve people's welfare in the Sei Sikambang D sub-district show that first, seen from the communication indicator, it is still not running optimally. Both resource indicators are good enough. Meanwhile, the availability of supporting facilities and infrastructure so far has been confirmed to be adequate. The three disposition indicators have been carried out properly, honestly and in accordance with the specified nominal. The four indicators of the bureaucratic structure are quite good and are carried out in an honest, disciplined and responsible manner. Furthermore, based on research results, the Direct Cash Assistance (BLT) policy in the Sei Sikambang D Village has a positive impact on people's welfare. The community feels helped by the presence of this program because they feel it can ease their economic burden. The inhibiting factors in the distribution of BLT to improve people's welfare in the Sei Sikambang Village, Medan, namely: First, budget limitations. Second Transparency in Determining BLT Beneficiaries. Third Delay in the distribution of funds.

Keywords: Implementation, BLT, Welfare

ABSTRAK

Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi suatu kebijakan (BLT) bantuan langsung tunai, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan Sei Sikambang D, dan Faktor yang menghambat dalam penyaluran dan pecairan bantuan langsung tunai (BLT) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sei Sikambang-D. Pada penelitian ini melakukan pendekatan dengan menggunakan suatu metode penelitian yang bersifat dekriptif (kualitatif). Pada penelitian ini mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah ada 10 (sepuluh) orang yang menjadi sumber informan dan siap memberikan data tanpa paksaan. Hasil penelitian dari implementasi suatu kebijakan (BLT) bantuan langsung tunai, untuk meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan bagi masyarakat di kelurahan Sei Sikambang D menunjukkan bahwa *Pertama* dilihat dari indikator

Komunikasi masih belum berjalan optimal. *Kedua* indikator sumber daya sudah cukup baik. Sementara dari ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sejauh ini sudah dipastikan memadai. *Ketiga* indikator disposisi telah dijalankan sebaik mungkin, jujur dan sama seperti dengan nominal yang telah di tentukan. Dan yang *Keempat* indikator struktur birokrasi sangat cukup baik dan telah terlaksana dengan terbuka dan jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Selanjutnya berdasarkan hasil dari penelitian Kebijakan (BLT) Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Sei Sikambang D membawa dampak yang positif untuk kesejahteraan masyarakat. Masyarakat merasa terbantu berkat kehadiran program ini karna merasa dapat meringankan beban ekonomi mereka. Faktor penghambat dalam penyaluran BLT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sei Sikambang Medan yaitu: *Pertama* Keterbatasan Anggaran. *Kedua* Transparansi Dalam Penetapan Penerima BLT. *Ketiga* Keterlambatan dalam penyaluran dana.

Kata Kunci: Implementasi, Blt, Kesejahteraan

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang menjalankan sistem pemerintahannya berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945. Dan hal tersebut merupakan acuan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pedoman serta acuan tersebut dapat bertujuan untuk NKRI pada umumnya adalah untuk mewujudkan serta menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyatnya. Yang dapat menjadi tolak ukur dalam mencapai tujuan adalah dapat membuktikan bahwa suatu Negara harus rakyatnya memiliki sejahtera supaya negara tersebut menciptakan rakyat yang cerdas, adil dalam bernegara, memiliki kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Tidak hanya berdasarkan kesejahteraan materi yang dapat menjadi tolak ukur kesejahteraan negara, tetapi harus memiliki kualitas kesehatan penduduk dan itu merupakan bentuk dari tanggungjawab yang harus dan wajib diperhatikan oleh setiap lembaga pemerintah (Trifena, 2020).

Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu fenomena global, artinya adalah kemiskinan itu merupakan salah satu masalah yang serius dan harus dihadapi oleh pemerintah dan pasti itu menjadi perhatian seluruh manusia pada umumnya. Kata dari kemiskinan setiap orang pasti mendengarkannya, dapat diketahui bahwa setiap seorang yang disebut miskin, jika ia masih belum mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhannya hidupnya setiap hari,

atau bisa disebut bahwa orang tersebut hidupnya masih serba kekurangan dalam segi ekonomi atau kebutuhan hidupnya serta tidak mempunyai harta yang banyak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari. (Lesawengan dkk, 2020).

Bantuan Langsung Tunai atau disingkat dengan (BLT) merupakan salah satu program bantuan dari lembaga pemerintah dengan berbagai jenis seperti pemberian berupa uang tunai dan masih banyak jenis yang lainnya, baik yang memiliki syarat (*conditional cash transfer*) maupun yang tidak memiliki syarat (*unconditional cash transfer*) bagi masyarakat yang miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah negara Brazil dan selanjutnya dilakukan oleh negara-negara yang lainnya. Dana yang diberikan atau yang dicairkan memiliki mekanisme yang berbeda-beda tergantung pada program dan kebijakan dalam memberikan BLT kepada masyarakat. Indonesia juga termasuk negara yang memiliki kebijakan dalam menyelenggarakan BLT, dengan cara berupa pemberian dari donasi sosial berupa uang tunai, jaminan kesehatan, pangan, serta biaya pendidikan. Sasarannya adalah: hampir miskin, miskin dan sangat miskin.

Bansos atau bantuan sosial mendapatkan banyak perhatian publik karena pada umumnya masih memiliki kepentingan lain yang perlu dilaksanakan dalam membantu tugas pemerintah daerah (Pemda) agar terwujudnya kemakmuran dan

kesejahteraan pada seluruh masyarakat, dalam menghadapi penyakit sosial dan juga dalam memuat suatu kepentingan politik yang luas (Amru, 2018).

BLT adalah serangkaian implementasi dari suatu intruksi/perintah presiden No.3/2008 tentang pelaksanaan program BLT demi kesejahteraan masyarakat dalam hal imbalan dalam meminimalisir subsidi BBM. Program pemerintah terkait BLT ini pelaksanaannya harus disesuaikan agar dapat langsung menyentuh dan dapat membersihkan manfaat secara langsung kepada masyarakat yang dikatakan miskin (terkategori RTS) memberi dukungan pada tanggungjawab sosial bersama-sama dan dapat membuahkan kepercayaan dari elemen masyarakat kepada seluruh pemerintah yang konsisten secara benar dalam memperhatikan rumah tangga. Itu merupakan sasaran yang tepat merasakan beban berat yang diakibatkan karena kenaikan harga BBM.

Pemerintah lurah dapat dipercayai karena lebih mampu dalam melihat semua prioritas seluruh kebutuhan masyarakat, jika dibanding dengan Pemda, faktanya memiliki ruang permasalahan yang lebih rumit dan yang lebih luas. Untuk itu, untuk pengelolaan BLT di Desa/kelurahan tersebut pemerintah Desa/Lurah diharapkan mampu melaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berprinsip akuntabel dan transparansi/terbuka.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2015:65) mengatakan implementasi adalah pelaksanaan suatu tindakan oleh setiap individu, pejabat serta instansi pemerintah, maupun juga kelompok swasta yang bertujuan untuk meraih cita-cita yang telah ditetapkan dalam setiap keputusan dan kebijakan tertentu.

Solichin (2018) mengatakan Implementasi merupakan suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu pejabat pemerintah, kelompok

pemerintah/swasta yang diarahkan pada indikator yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan pemerintah.

Ekawati dalam Taufik dkk (2013:136) menyebutkan, bahwa “implementasi mencakup tindakan oleh semua individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada setiap pencapaian dan serangkaian tujuan yang terus menerus dalam setiap keputusan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya”.

Tahapan implementasi suatu kebijakan dan menempatkan kebijakan sebagai pengaruh dari berbagai faktor dalam melaksanakan suatu kebijakan itu sendiri. Untuk itu dapat dipahami, bagaimana kinerja dari suatu kebijakan, sebagaimana yang dapat berinteraksi dengan kelompok atau sasaran dan bagaimana seluruh faktor lingkungannya seperti faktor politik, sosial, budaya dan lain-lainnya, yang memiliki pengaruh dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

Menurut Sitorus (2012:47) mengatakan bahwa dalam sebuah proses perumusan setiap kebijakan publik pada Negara demokrasi tentu saja harus melibatkan semua unsur yaitu unsur civil society, baik setiap lembaga pemerintah serta dunia usaha, dan seluruh masyarakat (*stakeholders*), harus didasari dan didukung oleh setiap nilai-nilai luhur suatu bangsa. Tanpa melibatkan, unsur pemerintah, legislatif, masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi kebijakan itu tidak akan berjalan dengan baik.

Dalam kacamata Edwards III, terhadap suatu implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh empat (4) hal, antara lain: pertama komunikasi, kedua sumberdaya, ketiga disposisi, dan keempat adalah struktur birokrasi. Keempat hal tersebut juga saling berhubungan satu sama lain dalam implementasi suatu kebijakan

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan memiliki syarat agar implementor

dapat mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan menjalin komunikasi yang baik didalamnya. Setiap apa yang harus menjadi tujuan serta sasaran suatu kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) dengan menggunakan komunikasi yang baik dan dapat membangun sehingga dapat bisa mengurangi distorsi suatu implementasi kebijakan. jika tujuan serta sasaran kebijakan yang tidak jelas dan bahkan tidak diketahui sama sekali oleh setiap kelompok dan sasaran, kemungkinan terjadi resistensi dari berbagai atau semua kelompok yang dituju.

2. Sumber daya

Walaupun disetiap kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas, tetapi tetapi jika salah atau implementor memiliki kekurangan untuk sumber daya dalam melaksanakannya, maka implementasi tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Sumber daya wujudnya adalah sumber daya manusia, antara lain seperti sumber daya finansial dan kompetensi implementor. Faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif adalah sumber daya.

3. Disposisi

Disposisi merupakan sifat dan karakteristik serta perilaku yang ada pada setiap implementor apabila implementor mempunyai bagian disposisi yang sangat baik, maka dirinya sangat bisa menjalankan implementasi suatu kebijakan dengan baik sama halnya tentang apa yang diharapkan oleh setiap pembuat kebijakan. jika implementor sudah memiliki sikap yang berbeda kepada pembuat kebijakan itu sendiri, maka proses implementasi suatu kebijakan juga menjadi tidak kacau atau dapat dikatakan tidak efisien dan efektif.

Berbagai pengalaman pada setiap pembangunan yang ada dinegara-negara seluruh dunia disposisi menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan serta kejujuran aparat sangat minim dan rendah. Dari berbagai kasus tindak pidana korupsi

(tipikor) yang sering muncul dinegara-negara seluruh dunia ketiga, termasuk indonesia contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat pemerintah dalam mengimplementasikan suatu program-program dalam pembnaganan.

4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi atau lembaga pemerintah yang diberi kewenangan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang dapat berpengaruh dan signifikan terhadap setiap implementasi suatu kebijakan. Salah satu dari seluruh aspek struktur yang penting dari setiap organisasi pemerintah adalah memiliki prosedur operasi yang dikenal dengan singkatan (SOP). SOP juga dapat menjadi pedoman di setiap implementator dalam melakukan tindakan. Struktur organisasi yang berkepanjangan cenderung dan dapat melemahkan pengawasan dan dapat juga menimbulkan *red-tape*, seperti prosedur birokrasi yang rumit/tidak relevan dan kompleks, pada gilirannya dapat menyebabkan aktivitas organisasi tidak maksimal.

Kesejahteraan Masyarakat

Pada umumnya adalah Kesejahteraan masyarakat dapat dirumuskan sebagai kondisi dalam mewujudkan segala kebutuhan pokok/dasar dalam tempat yang layak, harus terpenuhinya segala kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang dapat dijangkau dan memiliki kualitas suatu kondisi dimana setiap orang dapat mampu memaksimalkan utilitasnya pada suatu tingkat dan batas anggaran tertentu dan kondisi dimana terpenuhinya seluruh kebutuhan jasmani dan rohani. (Dahlia Sukmasari, 2020:1-16).

Keterkaitan antara konsep kesejahteraan dengan konsep kebutuhan adalah dengan terpenuhinya semua kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka seseorang sudah dinilai memiliki kesejahteraan, karena pada umumnya tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung searah dengan indikator pada kesejahteraan (Pramata, dkk 2012).

Menurut Thelma Lee Mendoza mengatakan bahwa terdapat tiga (3faktor) yang dapat mengakibatkan seseorang tidak dapat menjalankan seluruh fungsi sosialnya yaitu dapat diketahui pada tabel dibawah ini:

1	Disebabkan karna tidak mampu bagi setiap individu tersebut atau kadang kala disebabkan oleh setiap masalah yang dapat membuat seseorang sulit untuk memenuhi tuntutan pada lingkungannya.
2	Disebabkan karena tidak mampu pada situasi lingkungan dan termasuk pada kondisi lainnya yang berada di bawah kemampuan setiap individu untuk beradaptasi.
3	Ketidak mampuan karena personal dan situasional terjadi secara bersamaan

Pada tahun (1989) Bintarto mengatakan bahwa kesejahteraan adalah memiliki tolak ukur dalam kehidupan setiap individu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kualitas hidup dari berbagai aspek materi seperti kualitas bahan dan pangan, kualitas rumah tangga dan lain-lain.
2. Memiliki kualitas hidup dari segi fisik seperti lingkungan alam yang didiami, kesehatan fisik/tubuh dan dan lain sebagainya.
3. Memiliki kualitas hidup dari segi mental dan pikiran misalnya lingkungan, budaya, fasilitas, pendidikan dan sebagainya.
4. Memiliki kualitas hidup dari segi sipiritual dalam hal ini seperti etika, moral, keserasian saat adaptasi dan sebagainya.

Dalam perlindungan sosial adalah merupakan bagian dan hal penting yang strategi dalam membuat suatu kebijakan publik. Agar dapat meminimalisir angka kemiskinan dan menurunkan penderitaan multi dimensional (penyakit sosial) bagi setiap yang mengalaminya seperti kelompok-kelompok yang lemah dan kurang beruntung. Selaku pembuat

kebijakan publik, perlindungan sosial adalah merupakan salah satu tipe/bentuk dari suatu kebijakan sosial yang yang memberikan kejelasan dari berbagai seluruh bentuk pelayanan, ketetapan suatu program yang telah di kembangkan oleh setiap lembaga pemerintah tentunya memiliki tujuan untuk melindungi seluruh warganya, yang paling utama adalah kelompok rendah dan kelompok yang kurang beruntung, dari berbagai macam risiko seperti ekonomi, sosial dan politik yang telah menerpa kehidupan mereka

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif.

Informan Penelitian

Dalam menentukan informan pada penelitian ini, peneliti menggunakan Purposive Sampling artinya adalah teknik penentuan sampel melalui pertimbangan tertentu (Sugiyono 2019:133) Jadi yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Lurah, Sekretaris, Kasi Pembangunan dan Perwakilan Masyarakat Penerima BLT.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan berdasarkan metode observasi, wawancara dan dokumentasi kepada informan, yakni Lurah, Sekretaris, Kasi Pembangunan dan Perwakilan Masyarakat Penerima BLT.

Sumber Data Penelitian

Pada pengumpulan semua sumber data yang ada, penulis melakukan cara pengumpulan semua sumber data diantaranya data primer dan data sekunder. Data Primer ini merupakan salah satu sumber jenis data penelitian yang di peroleh saat melakukan penelitian secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara. Data Sekunder dapat diartikan sebgaia sumber data suatu penelitian dan yang dapat di peroleh oleh setiap peneliti

secara tidak langsung seperti data yang didapat melalui media dan perantara perantara.

Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan 3 model atau 3 jenis interaktif dalam melakukan analisis data, antara lain penyajian data, reduksi data, serta penarikan kesimpulan.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sei Sikambing (D) Kecamatan Medan Petisah (Kota Medan).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Sei Sikambing D

Menurut Edward III (Agustino 2012) terdapat 4 (empat) indikator dalam melihat bentuk implementasi suatu kebijakan. Keempat indikator tersebut ini sangat berpengaruh pada implementasi suatu kebijakan dan berinteraksi satu dengan yang lainnya baik dalam membantu/sebaliknya dapat menghambat implementasi. Berikut adalah implementasi suatu kebijakan BLT Kelurahan Sei Sikambing (D):

1. Indikator Komunikasi

Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Sei Sikambing D dilihat dari indikator komunikasi masih belum berjalan optimal. Meski telah di laksanakan sosialisasi namun masyarakat masih merasa belum sepenuhnya mendapatkan informasi yang jelas. Masyarakat masih memiliki keraguan terhadap kriteria dari penetapan penerima BLT. Hal ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial antar masyarakat karna merasa tidak transparannya proses pendataan dan verifikasi data masyarakat. Menurut masyarakat setempat perlu adanya peningkatan kualitas dari kinerja aparat terlebih dalam melakukan pendataan terkait

penerima BLT yang transparan dan tepat sasaran sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan dapat terhindar dari keraguan.

2. Indikator Sumber Daya

Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Sei Sikambing D dilihat dari indikator sumber daya sudah cukup baik. Setiap aparat yang bertugas, ikut terlibat dalam implementasi program BLT dan telah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, yang dalam arti lain bahwa sumber daya manusianya sudah baik dan telah tereduksi, berpengalaman dan mampu menyelesaikan tugas masing-masing sesuai dengan prosedur. Sementara dari ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sejauh ini sudah dipastikan memadai.

3. Indikator Disposisi

Implementasi penyaluran dana BLT di Kelurahan Sei Sikambing D di lihat dari indikator disposisi sudah berjalan dengan baik, jujur dan selaras dengan nominal yang telah di tentukan. Tidak ada pemotongan jumlah dana BLT yang diterima oleh masyarakat dan dalam penyaluran dananya telah diawasi ketat dan dijalankan sesuai dengan SOP.

4. Indikator Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam implementasi penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Sei Sikambing D di lihat dari indikator suatu struktur birokrasi yang sangat baik dan dilakukan dengan jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Semua aparat melaksanakan tugas masing masing sesuai dengan tupoksi dan dibawah pengawasan yang ketat.

Berdasarkan data yang di peroleh sebelumnya dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) membawa dampak yang positif untuk kesejahteraan masyarakat penerima

BLT di Kelurahan Sei Sikambang D. Masyarakat merasa terbantu karna program ini dapat meringankan beban ekonomi mereka. Hal ini di buktikan dengan pengakuan dari perwakilan penerima BLT di Kelurahan Sei Sikambang D bahwa BLT telah memberikan manfaat dan bantuan finansial kepada mereka dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meski masyarakat juga menilai bahwa nominal uang yang di dapatkan dari bantuan BLT ini tidak sepenuhnya memadai untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Namun masyarakat merasa bahwa bantuan BLT ini setidaknya dapat meringankan beban ekonomi mereka.

Yang menjadi faktor penghambat dalam Penyaluran (BLT) untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan kemakmuran di Kelurahan Sei Sikambang D:

1. Keterbatasan Anggaran Dana

Keterbatasan anggaran dana merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam penyaluran BLT di Kelurahan Sei Sikambang D. Aparat kelurahan mengklaim bahwa dana yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah masyarakat sehingga harus di prioritaskan keluarga yang benar-benar memenuhi kriteria.

2. Transparansi Dalam Penetapan Sasaran Penerima BLT

Faktor penghambat dari penyaluran dana BLT di Kelurahan Sei Sikambang D adalah terletak pada transparansi terkait penetapan sasaran penerima BLT. Masyarakat masih perlu edukasi dan informasi tambahan mengenai syarat-syarat yang harus di miliki keluarga penerima BLT, sehingga dengan sosialisasi dan edukasi yang tepat dan transparansi data oleh pihak yang bertugas maka kesalah pahaman antar masyarakat dan aparat pun terminimalisir.

3. Keterlambatan Dalam Penyaluran Dana

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor lain yang

menjadi penghambat dari penyaluran dana BLT di Kelurahan Sei Sikambang D adalah keterlambatan dalam penyaluran dana. Hal ini di sebabkan oleh terlambatnya dana masuk ke rekening sehingga penyaluran dana harus di tunda bahkan di akumulasikan dalam waktu 3 bulan.

5. SIMPULAN

Berdasarkan uraian penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Sei Sikambang D” sebelumnya maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Sei Sikambang D, *Pertama* indikator komunikasi masih belum berjalan optimal. *Kedua* indikator sumber daya sudah cukup baik meski ada beberapa kesalahan seperti dalam penginputan data tapi masih bisa di handle dan di pertanggungjawabkan. *Ketiga* indikator disposisi telah dilaksanakan namun pengawasan yang ketat khususnya dalam penyaluran dana tetap dilakukan untuk memastikan kejujuran aparat dalam melaksanakan tugas. *Keempat* indikator struktur birokrasi belum optimal aparat masih harus terus mengupgrade ilmunya agar bisa terus beradaptasi dengan setiap perubahan kebijakan. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Sei Sikambang D membawa dampak yang positif untuk kesejahteraan masyarakat. Namun nominalnya tidak sepenuhnya mengcover kebutuhan masyarakat.
2. Faktor penghambat dalam penyaluran BLT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sei Sikambang Medan yaitu: *Pertama* Keterbatasan Anggaran. *Kedua* Transparansi Dalam Penetapan Penerima BLT. *Ketiga* Keterlambatan dalam penyaluran dana.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Akib Irwan. (2016). Bantuan Langsung Tunai (studi kasus pada masyarakat di kelurahan karema kecamatan mamuju kabupaten mamuju jurnal ekulibrium pendidikan sosiologi universitas muhamat makassar, e-2477-0221 p-2339-201. Dampak bantuan langsung Tunai (BLT) terhadap kesejahteraan terhadap masyarakat studi kasus: kota bandung, Blog Elinpike.
- Daniel A. Mazmaniandan Paul A. Sabaiter (2017:35) Makna implementasi yang memahami kegiatan suatu program.
- David L. Weimer dan Aidan R. Vining (2018) Kelompok yang mempengaruhi keberhasilan implementasi.
- Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (2013:47) Variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi.
- Dahlia Sukmasari, (2020: 1-16) Kesejahteraan Masyarakat.
- Edi Suharto (2016) Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia.
- Erwan Agus Purwanto, Ph. D, Dyah Ratih Sulistyastuti M. Si (2015) tentang judul Implementasi kebijakan public.
- Edwards III dalam Agustino (2012) Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) (*Doctoral dissertation*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Ekawati (Taufik dan Isril, 2013:136) Defenisi Implementasi secara eksplisit.
- Hasbi, I., 2008. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2017 Di Kabupaten Kudus. Jurnal Ilmu Administrasi Konsentrasi: Magister Administrasi Publik.
- H. Tachjan (2017) Unsur Implementasi Kebijakan yang mutlak. Iping, B. 2020. Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol1, No.1:516-526.
- Imron (2012) Kesejahteraan Masyarakat Sebagai Fungsi Sosial. Mau, C.E.F. (2020) Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi masyarakat miskin Terkena dampak Sulun Tareran Kabupaten Minahasa selatan. Jurnal politic, 9(2),1-16.
- Mulyadi (2015:12) Implementasi mengacu pada tujuan dalam suatu keputusan. Merilee S. Grindle Teori Keberhasilan Implementasi.
- Matland (Hamdi, 2014:98) Model Implementasi Kebijakan. Nasikun (1996) Indikator Kesejahteraan Masyarakat. Prof. Adi Fahrudin, Ph. D. (2014) Pengantar Kesejahteraan Sosial. Repository. unimar-amni.ac.id pertama kali di index soleh Google pada March 2020 <http://repository.unimar-amni.ac.id/3190/2/BAB/202.pdf>.
- Solichin (2018) Implementasi Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam, 5(1), 20-39.
- Sugiyono, (2021: 1). Metode Penelitian kualitatif Artikel pada Jurnal Internasional).
- Siti Nur Ani, Jamiah, Raudah, Muhamad. [Ht://ejournal.untangsmd.ac.id/index.php/PD/article/download/6130/5679](http://ejournal.untangsmd.ac.id/index.php/PD/article/download/6130/5679).
- Sitorus (2012:47) Perumusan Kebijakan public Terri (1977:31) Program yang dilaksanakan serta kebijakan public.